

Inflasi, Daya Beli, dan Kesejahteraan Rumah Tangga Indonesia

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1 INFLASI

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum.



2 DAYA BELI

Kemampuan pendapatan rumah tangga membeli kebutuhan.



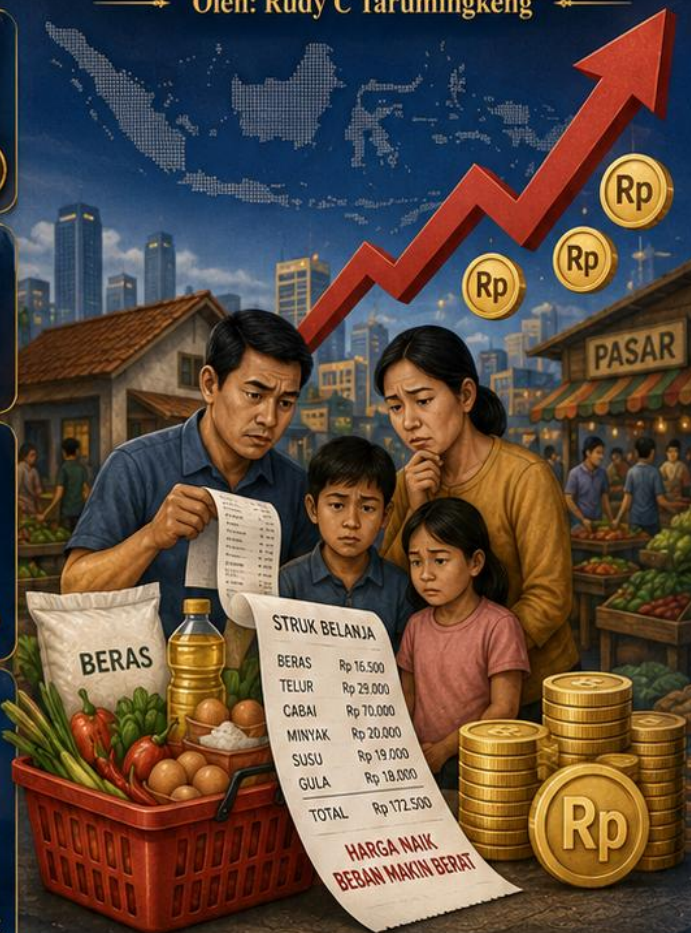
3 KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA

Kualitas hidup, keamanan ekonomi, dan konsumsi layak.



4 HARGA PANGAN

Beras, telur, cabai, minyak goreng, dan kebutuhan pokok sangat memengaruhi rumah tangga.



5 PENDAPATAN RIIL

Daya beli menurun bila inflasi lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan.



6 PERLINDUNGAN SOSIAL

Bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, dan jaring pengaman.



BANSOS
SUBSIDI
PKH / BPNT

7 STABILITAS HARGA

Peran kebijakan moneter, fiskal, dan distribusi/logistik.



BANK
INDONESIA



KEBUJAKAN
FISKAL



DISTRIBUSI
DAN LOGISTIK

8 PERTUMBUHAN INKLUSIF

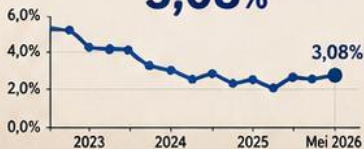
Inflasi terkendali mendukung konsumsi, UMKM, dan kesejahteraan.



RINGKASAN DATA

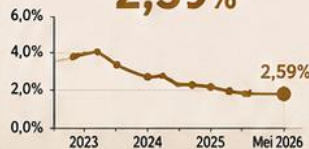
Inflasi IHK (Mei 2026)

3,08%



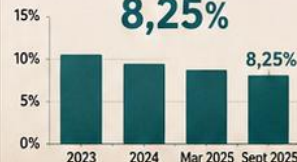
Inflasi Inti

2,59%



Penduduk Miskin (Sept 2025)

8,25%



Stabilitas harga penting untuk menjaga konsumsi, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.

RANTAI DAMPAK



Inflasi naik



Daya beli turun



Kesejahteraan tertekan

RESPONS KEBIJAKAN



Kebijakan moneter



Perlindungan sosial



Ketahanan pangan



Stabilitas & Kesejahteraan



Stabilitas



Keterjangkauan



Perlindungan



Produktivitas



Kesejahteraan



*Rudy C Tarumingkeng: Inflasi, Daya Beli, dan Kesejahteraan Rumah
Tangga Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

12 Juni 2026

INFLASI, DAYA BELI, DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA INDONESIA

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang paling langsung dirasakan oleh rumah tangga. Berbeda dengan indikator makro seperti pertumbuhan produk domestik bruto, neraca perdagangan, cadangan devisa, atau suku bunga acuan yang sering tampak abstrak, inflasi hadir dalam pengalaman harian masyarakat melalui harga beras, minyak goreng, telur, cabai, transportasi, listrik, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Artikel ini membahas hubungan antara inflasi, daya beli, dan kesejahteraan rumah tangga Indonesia dengan pendekatan ekonomi makro, ekonomi kesejahteraan, dan kebijakan publik. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan untuk menjaga nilai riil pendapatan, kepastian konsumsi, stabilitas usaha, dan keberlanjutan pertumbuhan. Namun, inflasi tidak bersifat netral secara sosial. Dampaknya berbeda antar-kelompok pendapatan, antar-wilayah, antar-profesi, dan antar-komposisi konsumsi rumah tangga. Rumah tangga miskin dan rentan lebih terpuuk oleh inflasi pangan karena porsi pengeluaran mereka untuk makanan lebih besar daripada kelompok menengah-atas. Dalam konteks Indonesia mutakhir, inflasi IHK Mei 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan, inflasi bulanan 0,28 persen, inflasi tahun kalender 1,35 persen, dan inflasi inti 2,59 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi 2026

sebesar $2,5 \pm 1$ persen, tetapi tetap perlu dibaca secara hati-hati karena tekanan harga pangan, energi, nilai tukar, dan ekspektasi harga dapat langsung memengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Pada sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara tingkat kemiskinan September 2025 tercatat 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Artikel ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar agenda teknokratik bank sentral, melainkan kebijakan kesejahteraan sosial yang menuntut koordinasi moneter, fiskal, pangan, energi, logistik, perlindungan sosial, dan tata kelola pasar. Kesejahteraan rumah tangga Indonesia hanya dapat dijaga apabila stabilitas harga dipadukan dengan peningkatan pendapatan, perlindungan kelompok rentan, produktivitas sektor pangan, dan kebijakan publik yang adil.

Kata kunci: *inflasi, daya beli, kesejahteraan rumah tangga, Indonesia, harga pangan, kemiskinan, konsumsi rumah tangga, kebijakan moneter, perlindungan sosial, stabilitas harga.*

1. Pendahuluan

Inflasi adalah salah satu konsep ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagi rumah tangga, inflasi bukan hanya angka statistik yang diumumkan setiap bulan, melainkan perubahan nyata pada isi dompet dan keranjang belanja. Ketika harga beras naik, uang belanja yang sama menghasilkan jumlah konsumsi yang lebih sedikit. Ketika harga transportasi meningkat, biaya bekerja, sekolah, berdagang, dan mengakses layanan kesehatan ikut naik. Ketika harga pangan pokok melonjak, rumah tangga miskin dapat mengurangi kualitas makanan, menunda pembelian kebutuhan lain, atau bahkan menarik anak dari kegiatan pendidikan tambahan.

Dalam teori ekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu periode. Bank Indonesia menjelaskan bahwa kenaikan satu atau dua barang belum dapat disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas atau mendorong kenaikan harga barang lain. Inflasi diukur oleh Badan Pusat Statistik melalui Indeks Harga Konsumen, yang mencakup sebelas kelompok pengeluaran, antara lain makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kesehatan; transportasi; pendidikan; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. ([Bank Indonesia](#))

Kenaikan harga yang moderat dapat mencerminkan dinamika ekonomi yang sehat, terutama jika didorong oleh peningkatan permintaan akibat pertumbuhan pendapatan. Namun inflasi yang tinggi, tidak stabil, atau tidak merata dapat merusak kesejahteraan. Inflasi mengurangi nilai riil uang, mengganggu perencanaan rumah tangga, memperbesar ketidakpastian usaha, dan menurunkan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi. Bagi masyarakat berpendapatan tetap, inflasi yang lebih cepat daripada kenaikan pendapatan berarti penurunan daya beli.

Dalam konteks Indonesia, isu inflasi memiliki bobot sosial yang besar. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keragaman wilayah, struktur pasar yang tidak selalu efisien, ketergantungan sebagian komoditas pada distribusi antarwilayah, serta sensitivitas tinggi terhadap harga pangan. Inflasi di kota besar dapat berbeda dari inflasi di daerah terpencil. Harga cabai, bawang, beras, telur, ikan, daging ayam, BBM, transportasi udara, dan tarif energi dapat menjadi sumber tekanan harga yang memengaruhi rumah tangga secara langsung.

Pada Mei 2026, BPS mencatat inflasi Indonesia secara tahunan sebesar 3,08 persen dengan IHK 111,40. Inflasi bulanan tercatat 0,28 persen, inflasi tahun kalender 1,35 persen, dan inflasi inti tahunan 2,59 persen. Secara wilayah, inflasi tahunan tertinggi pada tingkat provinsi terjadi di Papua Barat sebesar 5,94 persen, sedangkan terendah di Lampung sebesar 1,94 persen. Pada tingkat kabupaten/kota, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten

Aceh Tengah sebesar 6,09 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,66 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data tersebut menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya fenomena nasional, melainkan juga fenomena spasial. Angka rata-rata nasional dapat menyembunyikan tekanan harga yang lebih tinggi di daerah tertentu. Bagi rumah tangga di wilayah dengan inflasi tinggi, pengalaman ekonomi sehari-hari dapat jauh lebih berat daripada yang ditunjukkan oleh angka nasional. Karena itu, analisis inflasi harus selalu dikaitkan dengan struktur konsumsi, kondisi wilayah, pendapatan rumah tangga, dan akses terhadap perlindungan sosial.

Artikel ini membahas inflasi bukan semata sebagai variabel moneter, tetapi sebagai isu kesejahteraan rumah tangga. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana inflasi memengaruhi daya beli? Mengapa dampak inflasi berbeda antar-rumah tangga? Bagaimana inflasi berkaitan dengan kemiskinan dan kelas menengah? Mengapa pengendalian inflasi memerlukan koordinasi lintas sektor? Dan kebijakan apa yang diperlukan agar stabilitas harga benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

2. Konsep Dasar Inflasi dan Pengukurannya

Inflasi biasanya diukur dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK menggambarkan perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Jika IHK naik, berarti rata-rata harga barang dan jasa dalam keranjang konsumsi meningkat. Inflasi dapat dihitung secara bulanan, tahunan, atau tahun kalender. Inflasi bulanan menunjukkan perubahan harga dari satu bulan ke bulan berikutnya. Inflasi tahunan menunjukkan perubahan harga dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Inflasi tahun kalender menunjukkan perubahan sejak awal tahun.

Bank Indonesia membedakan inflasi Indonesia ke dalam tiga kelompok utama: inflasi inti, volatile food, dan administered prices. Inflasi inti

mencerminkan komponen harga yang lebih persisten dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, dan ekspektasi inflasi. Volatile food dipengaruhi oleh gejolak pangan, panen, gangguan alam, distribusi, serta perkembangan harga pangan domestik dan internasional. Administered prices dipengaruhi oleh kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif transportasi. ([Bank Indonesia](#))

Pembedaan ini penting karena sumber inflasi menentukan respons kebijakan. Jika inflasi terutama berasal dari tekanan permintaan, kebijakan moneter melalui suku bunga dapat lebih relevan. Jika inflasi berasal dari gangguan pasokan pangan, kebijakan produksi, distribusi, cadangan pangan, impor tepat waktu, dan logistik lebih menentukan. Jika inflasi berasal dari administered prices, kebijakan subsidi, kompensasi, tarif energi, dan komunikasi publik menjadi sangat penting.

Inflasi juga dapat dilihat dari sisi penyebabnya. Pertama, demand-pull inflation terjadi ketika permintaan agregat lebih besar daripada kapasitas produksi. Dalam situasi ini, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha meningkatkan belanja lebih cepat daripada kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa. Kedua, cost-push inflation terjadi ketika biaya produksi meningkat, misalnya akibat kenaikan harga energi, depresiasi nilai tukar, kenaikan upah yang tidak diimbangi produktivitas, atau gangguan pasokan bahan baku. Ketiga, imported inflation terjadi ketika harga barang impor naik atau nilai tukar melemah sehingga harga barang impor dalam rupiah menjadi lebih mahal. Keempat, expectation-driven inflation terjadi ketika pelaku ekonomi memperkirakan harga akan naik, lalu menyesuaikan harga, upah, dan kontrak sehingga ekspektasi itu menjadi kenyataan.

Dalam rumah tangga, inflasi dirasakan sebagai perubahan biaya hidup. Namun inflasi resmi tidak selalu sama dengan inflasi yang dirasakan. Rumah tangga miskin yang sebagian besar pengeluarannya untuk makanan akan merasa lebih terpuak ketika harga pangan naik, meskipun

inflasi umum tampak moderat. Sebaliknya, rumah tangga menengah-atas yang lebih banyak membelanjakan uang untuk pendidikan, kesehatan, transportasi pribadi, rekreasi, dan aset mungkin merasakan pola inflasi yang berbeda. Oleh karena itu, inflasi tidak hanya menyangkut tingkat harga rata-rata, tetapi juga struktur pengeluaran rumah tangga.

3. Inflasi dan Daya Beli: Mekanisme Mikroekonomi Rumah Tangga

Daya beli adalah kemampuan pendapatan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Jika pendapatan nominal naik 5 persen tetapi harga kebutuhan naik 7 persen, maka daya beli riil turun. Sebaliknya, jika pendapatan nominal naik lebih tinggi daripada inflasi, daya beli meningkat. Dengan demikian, kesejahteraan rumah tangga tidak cukup dilihat dari pendapatan nominal, tetapi harus dilihat dari pendapatan riil.

Inflasi memengaruhi daya beli melalui beberapa mekanisme. Pertama, inflasi mengurangi nilai riil pendapatan tetap. Pegawai bergaji tetap, pensiunan, pekerja informal dengan pendapatan harian yang tidak menyesuaikan cepat, dan penerima bantuan sosial nominal tetap akan mengalami penurunan daya beli ketika harga naik. Kedua, inflasi mengubah alokasi belanja rumah tangga. Kenaikan harga pangan membuat rumah tangga mengurangi belanja nonpangan, seperti pendidikan tambahan, transportasi non-esensial, pakaian, tabungan, atau rekreasi. Ketiga, inflasi menurunkan kemampuan menabung. Rumah tangga yang sebelumnya masih dapat menyisihkan pendapatan untuk dana darurat dapat kehilangan ruang tabungan ketika harga kebutuhan pokok naik. Keempat, inflasi dapat meningkatkan utang konsumsi. Jika pengeluaran wajib naik sementara pendapatan tetap, rumah tangga mungkin menggunakan pinjaman informal, paylater, kartu kredit, atau utang kepada keluarga.

Dampak inflasi terhadap daya beli sangat tergantung pada jenis barang yang mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga barang mewah tidak

terlalu memengaruhi rumah tangga miskin, tetapi kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, LPG, transportasi, dan listrik sangat memengaruhi mereka. Karena itu, inflasi pangan adalah isu kesejahteraan yang sangat penting di Indonesia.

Bank Indonesia menegaskan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan. Inflasi tinggi secara persisten menggerus pendapatan riil, memperburuk standar hidup, dan terutama merugikan kelompok masyarakat di bagian bawah piramida pendapatan. Inflasi yang tidak stabil juga menciptakan ketidakpastian dalam keputusan konsumsi, investasi, dan produksi. ([Bank Indonesia](#))

Mekanisme ini dapat dijelaskan melalui contoh sederhana. Sebuah rumah tangga berpendapatan Rp3.500.000 per bulan mengalokasikan Rp1.750.000 untuk makanan, Rp500.000 untuk transportasi, Rp400.000 untuk sewa atau cicilan, Rp250.000 untuk listrik dan komunikasi, Rp300.000 untuk pendidikan anak, dan Rp300.000 untuk kebutuhan lain. Jika harga makanan naik 10 persen, rumah tangga itu membutuhkan tambahan Rp175.000 hanya untuk mempertahankan pola konsumsi makanan yang sama. Jika pendapatan tidak naik, tambahan itu harus diambil dari pos lain. Biasanya yang dikorbankan adalah kualitas makanan, tabungan, pendidikan tambahan, kesehatan preventif, atau konsumsi sosial. Dalam jangka panjang, penyesuaian semacam ini dapat menurunkan kualitas hidup dan mobilitas sosial.

4. Inflasi Tidak Netral: Dampak Berbeda Antar-Kelompok Sosial

Salah satu kesalahan umum dalam membaca inflasi adalah menganggap bahwa inflasi memengaruhi semua orang secara sama. Padahal inflasi bersifat distributif. Ia mengubah daya beli relatif antar-kelompok. Ada kelompok yang lebih mampu melindungi diri dari inflasi, dan ada kelompok yang sangat rentan.

Kelompok berpendapatan tinggi biasanya memiliki aset, tabungan, investasi, properti, atau instrumen keuangan yang sebagian nilainya dapat bergerak mengikuti inflasi. Mereka juga memiliki ruang substitusi konsumsi yang lebih besar. Jika harga satu jenis makanan naik, mereka dapat beralih ke alternatif lain tanpa mengurangi kecukupan gizi. Jika harga transportasi naik, mereka tetap memiliki pilihan moda. Jika biaya pendidikan naik, mereka masih dapat membayar.

Sebaliknya, rumah tangga miskin dan rentan memiliki ruang penyesuaian terbatas. Porsi pengeluaran makanan mereka besar. Mereka sering membeli dalam jumlah kecil sehingga tidak mendapat harga grosir. Mereka lebih rentan terhadap kenaikan biaya transportasi karena pekerjaan informal membutuhkan mobilitas harian. Mereka juga sering tidak memiliki tabungan memadai. Ketika inflasi terjadi, pilihan mereka bukan sekadar mengurangi konsumsi rekreasi, tetapi dapat menyangkut pengurangan kualitas pangan, penundaan pengobatan, atau pengurangan biaya pendidikan.

Inflasi juga berdampak berbeda menurut status pekerjaan. Pekerja formal dengan kontrak dan perlindungan upah mungkin memiliki mekanisme penyesuaian pendapatan, meskipun tidak selalu cepat. Pekerja informal seperti pedagang kecil, pengemudi, buruh harian, pekerja rumah tangga, dan nelayan memiliki pendapatan yang lebih fluktuatif. Sebagian dapat menaikkan harga jasa, tetapi sebagian lain tidak dapat melakukannya karena daya beli pelanggan juga melemah.

Perbedaan wilayah juga penting. Indonesia memiliki struktur logistik kepulauan. Harga bahan pangan di wilayah produksi dapat berbeda jauh dari wilayah konsumsi. Daerah terpencil menghadapi biaya transportasi tinggi. Gangguan cuaca, bencana, kemacetan pelabuhan, atau keterbatasan infrastruktur dapat memperbesar inflasi lokal. Data Mei 2026 menunjukkan variasi inflasi provinsi dan kabupaten/kota yang cukup lebar, dari 0,66 persen di Kabupaten Minahasa Utara hingga 6,09 persen di Kabupaten Aceh Tengah secara tahunan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena inflasi tidak netral, kebijakan anti-inflasi harus memperhatikan keadilan. Menurunkan inflasi umum penting, tetapi belum cukup. Pemerintah perlu memastikan bahwa inflasi pangan, energi rumah tangga, transportasi publik, dan kebutuhan dasar terkendali. Stabilitas harga harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial.

5. Inflasi Pangan sebagai Isu Kesejahteraan

Di Indonesia, inflasi pangan memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan rumah tangga. Pangan bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi kebutuhan dasar kehidupan. Kenaikan harga pangan dapat langsung menurunkan asupan gizi, terutama pada keluarga miskin, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan pekerja berpendapatan rendah. Dalam jangka panjang, inflasi pangan yang tinggi dapat memperburuk stunting, kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas.

Inflasi pangan biasanya berasal dari kombinasi faktor produksi, distribusi, cuaca, pasar, dan kebijakan. Dari sisi produksi, panen yang terganggu oleh iklim, penyakit tanaman, biaya pupuk, dan produktivitas rendah dapat menurunkan pasokan. Dari sisi distribusi, biaya logistik, rantai pasok panjang, margin perdagangan, dan keterbatasan cold chain dapat menaikkan harga. Dari sisi pasar, perilaku spekulatif, penimbunan, atau konsentrasi distribusi dapat memperburuk gejolak. Dari sisi kebijakan, keterlambatan impor, ketidaktepatan cadangan pangan, atau koordinasi pusat-daerah yang lemah dapat memperpanjang tekanan harga.

Volatile food adalah salah satu komponen inflasi yang sangat penting di Indonesia. Bank Indonesia menjelaskan bahwa volatile food dipengaruhi oleh kejutan pada kelompok bahan makanan, seperti panen, gangguan alam, serta perkembangan harga pangan domestik dan internasional. Karena itu, pengendalian inflasi pangan tidak dapat hanya mengandalkan suku bunga, tetapi membutuhkan kebijakan pasokan, distribusi, dan koordinasi pemerintah. ([Bank Indonesia](#))

Inflasi pangan memiliki efek sosial yang lebih berat daripada inflasi barang tahan lama. Rumah tangga dapat menunda pembelian televisi, perabot, atau kendaraan, tetapi tidak dapat menunda konsumsi pangan. Ketika harga pangan naik, rumah tangga miskin sering melakukan coping strategy seperti mengurangi lauk bergizi, membeli pangan lebih murah tetapi kurang bergizi, mengurangi frekuensi makan, atau mengalihkan pengeluaran pendidikan dan kesehatan ke makanan. Strategi ini dapat tampak rasional dalam jangka pendek, tetapi merugikan kualitas manusia dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, inflasi pangan adalah pajak tersembunyi yang regresif. Ia mengambil proporsi lebih besar dari pendapatan rumah tangga miskin daripada rumah tangga kaya. Karena itu, stabilisasi harga pangan adalah kebijakan anti-kemiskinan. Kebijakan pangan yang baik bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keterjangkauan, ketersediaan, kualitas gizi, dan akses antardaerah.

6. Inflasi, Kemiskinan, dan Kerentanan Rumah Tangga

Inflasi memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan. Ketika harga kebutuhan dasar naik, garis kemiskinan ikut naik. Rumah tangga yang sebelumnya sedikit berada di atas garis kemiskinan dapat jatuh miskin jika pendapatan tidak mengikuti kenaikan harga. Karena itu, inflasi tidak hanya memengaruhi penduduk miskin yang sudah ada, tetapi juga rumah tangga rentan yang berada dekat garis kemiskinan.

BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Angka ini menurun 0,22 persen poin dibanding Maret 2025 dan menurun 0,32 persen poin dibanding September 2024. Di wilayah perkotaan, persentase penduduk

miskin September 2025 sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan 10,72 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Penurunan kemiskinan tersebut merupakan perkembangan positif, tetapi tidak menghapus kerentanan. Penduduk miskin dan hampir miskin tetap berhadapan dengan risiko inflasi, terutama inflasi pangan dan energi. Jika harga beras, telur, minyak goreng, transportasi, dan listrik naik bersamaan, rumah tangga rentan dapat kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Inilah sebabnya mengapa kebijakan inflasi harus terkait dengan kebijakan perlindungan sosial.

Rumah tangga miskin biasanya memiliki beberapa ciri kerentanan. Pertama, pendapatan mereka rendah dan tidak stabil. Kedua, mereka memiliki tabungan terbatas. Ketiga, akses terhadap kredit formal rendah. Keempat, pekerjaan mereka rentan terhadap guncangan ekonomi. Kelima, porsi pengeluaran makanan tinggi. Keenam, mereka sering tinggal di wilayah dengan akses layanan publik terbatas. Kombinasi ini membuat inflasi menjadi beban sosial yang serius.

Inflasi juga berdampak pada kelas menengah bawah. Kelompok ini mungkin tidak tercatat miskin, tetapi rentan turun kelas ketika biaya hidup naik. Cicilan rumah, biaya sekolah, transportasi, kesehatan, internet, dan makanan dapat menyerap sebagian besar pendapatan. Ketika inflasi meningkat, mereka mengurangi tabungan, menunda investasi pendidikan, atau menambah utang konsumsi. Dalam jangka panjang, tekanan biaya hidup dapat menurunkan aspirasi sosial dan memperlemah kelas menengah sebagai penggerak ekonomi.

Karena itu, ukuran kesejahteraan tidak cukup melihat angka kemiskinan. Kita perlu melihat kedalaman kemiskinan, kerentanan, ketimpangan, kualitas konsumsi, akses layanan publik, dan stabilitas pendapatan. Inflasi dapat memperburuk semua dimensi tersebut apabila tidak dikendalikan.

7. Konsumsi Rumah Tangga sebagai Penopang Ekonomi

Konsumsi rumah tangga adalah komponen utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika daya beli rumah tangga terjaga, konsumsi menopang produksi, perdagangan, jasa, transportasi, restoran, UMKM, dan lapangan kerja. Sebaliknya, ketika daya beli melemah, permintaan domestik turun dan pertumbuhan ekonomi melambat.

Pada triwulan I 2026, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi, yaitu 21,81 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) BPS juga menyebut konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan triwulan I 2026, dengan konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,94 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode tersebut dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat pada hari besar keagamaan, kebijakan pengendalian inflasi, serta stimulus pemerintah seperti diskon tiket transportasi dan pembayaran THR atau gaji ke-14. BPS juga mencatat perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 13,14 persen secara tahunan pada triwulan I 2026, disertai kenaikan jumlah penumpang beberapa moda transportasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, ketergantungan pada konsumsi rumah tangga juga berarti bahwa inflasi dapat menjadi risiko pertumbuhan. Jika inflasi menekan daya beli, konsumsi melemah. Jika konsumsi melemah, pelaku usaha mengurangi produksi. Jika produksi berkurang, lapangan kerja dan pendapatan ikut tertekan. Dengan demikian, pengendalian inflasi bukan hanya menjaga kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga menjaga mesin pertumbuhan ekonomi domestik.

Bank Indonesia pada Juni 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen Mei 2026 sebesar 120,9, masih berada pada zona optimistis di atas 100. Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat menjadi 129,7, sedangkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini berada pada 112,2. ([Bank Indonesia](#)) Data ini

menunjukkan bahwa keyakinan konsumen tetap relatif kuat, tetapi stabilitas daya beli tetap harus dijaga karena ekspektasi konsumen dapat berubah cepat bila inflasi pangan dan energi meningkat.

Survei penjualan eceran Bank Indonesia juga memperkirakan penjualan eceran Mei 2026 tetap stabil, dengan Indeks Penjualan Riil sebesar 225,0. Namun, responden memperkirakan tekanan harga relatif stabil dalam tiga bulan ke depan dan meningkat dalam enam bulan ke depan, terutama karena harga bahan baku lebih tinggi. ([Bank Indonesia](#)) Informasi ini penting karena ekspektasi harga pelaku usaha dapat memengaruhi harga konsumen di masa depan.

8. Inflasi, Upah, dan Pendapatan Riil

Daya beli rumah tangga sangat tergantung pada hubungan antara inflasi dan pendapatan. Jika upah naik sejalan dengan produktivitas dan lebih tinggi daripada inflasi, rumah tangga memperoleh peningkatan kesejahteraan. Jika upah tertinggal dari inflasi, pendapatan riil turun.

Dalam pasar tenaga kerja, tidak semua pekerja memiliki posisi tawar yang sama. Pekerja formal di perusahaan besar mungkin memiliki penyesuaian upah tahunan. Pegawai negeri menerima gaji dan tunjangan sesuai kebijakan negara. Namun pekerja informal, buruh harian, pekerja lepas, petani kecil, nelayan, dan pedagang mikro sering tidak memiliki mekanisme penyesuaian upah yang pasti. Ketika harga naik, pendapatan mereka belum tentu naik.

Inflasi juga dapat menciptakan wage-price spiral jika kenaikan harga memicu tuntutan kenaikan upah, lalu kenaikan upah meningkatkan biaya produksi, dan biaya tersebut diteruskan ke harga konsumen. Namun spiral ini tidak otomatis terjadi. Ia tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja, produktivitas, struktur industri, ekspektasi inflasi, dan kredibilitas kebijakan moneter.

Dalam konteks kesejahteraan, kenaikan upah nominal harus dihubungkan dengan produktivitas. Kenaikan pendapatan yang berkelanjutan membutuhkan peningkatan keterampilan, teknologi, efisiensi usaha, dan nilai tambah. Jika kenaikan upah tidak disertai produktivitas, pelaku usaha dapat menaikkan harga atau mengurangi tenaga kerja. Sebaliknya, jika produktivitas meningkat, upah dapat naik tanpa menimbulkan inflasi berlebihan.

Karena itu, kebijakan daya beli tidak cukup berupa pengendalian harga. Daya beli harus diperkuat melalui peningkatan pendapatan. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan UMKM, pendidikan vokasi, produktivitas pertanian, industrialisasi bernilai tambah, digitalisasi usaha kecil, dan akses pasar. Inflasi yang rendah menjaga nilai uang; produktivitas yang tinggi meningkatkan isi dompet.

9. Kebijakan Moneter: Menjaga Stabilitas Harga dan Ekspektasi

Kebijakan moneter memiliki peran sentral dalam pengendalian inflasi, terutama inflasi yang berasal dari permintaan agregat, ekspektasi, nilai tukar, dan kondisi likuiditas. Bank sentral menggunakan instrumen seperti suku bunga kebijakan, operasi pasar, cadangan wajib, intervensi valuta asing, dan komunikasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

Bank Indonesia menyatakan bahwa sasaran inflasi Indonesia untuk 2025, 2026, dan 2027 ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi ± 1 persen berdasarkan PMK No. 31 Tahun 2024. Pada laman yang sama, BI mencatat inflasi IHK tahunan 31 Mei 2026 sebesar 3,08 persen. ([Bank Indonesia](#)) Dengan demikian, inflasi Mei 2026 masih berada dalam koridor sasaran 1,5–3,5 persen.

Pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia mencatat BI-Rate sebesar 5,50 persen. Sebelumnya, BI-Rate berada pada 5,25 persen pada 20 Mei 2026 dan 4,75 persen pada 22 April 2026. ([Bank Indonesia](#)) Kenaikan suku bunga ini

menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak hanya merespons inflasi aktual, tetapi juga risiko nilai tukar, ekspektasi inflasi, dan stabilitas makro.

Suku bunga memengaruhi inflasi melalui beberapa saluran. Pertama, suku bunga yang lebih tinggi dapat menahan konsumsi dan investasi kredit sehingga mengurangi tekanan permintaan. Kedua, suku bunga yang lebih menarik dapat mendukung stabilitas nilai tukar melalui aliran modal dan daya tarik aset rupiah. Ketiga, suku bunga memengaruhi ekspektasi pelaku ekonomi bahwa bank sentral berkomitmen menjaga inflasi. Keempat, suku bunga memengaruhi biaya pinjaman rumah tangga dan usaha.

Namun, kebijakan moneter memiliki dilema. Suku bunga tinggi dapat membantu menahan inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi juga dapat meningkatkan beban cicilan, menekan kredit konsumsi, memperlambat investasi, dan membebani UMKM. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus seimbang: cukup tegas menjaga stabilitas, tetapi tidak berlebihan hingga mematikan pertumbuhan.

Pengendalian inflasi di Indonesia juga tidak dapat hanya mengandalkan BI. Bank Indonesia menegaskan bahwa inflasi dipengaruhi oleh faktor permintaan, pasokan, harga yang diatur pemerintah, dan volatile food; karena itu pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerja sama pemerintah dan BI melalui kebijakan makro, fiskal, moneter, dan sektoral, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. ([Bank Indonesia](#))

10. Kebijakan Fiskal dan Perlindungan Sosial

Kebijakan fiskal berperan penting dalam menjaga daya beli. APBN dapat menahan tekanan inflasi melalui subsidi, kompensasi, bantuan sosial, operasi pasar, cadangan pangan, dan belanja infrastruktur logistik. Namun kebijakan fiskal juga dapat menjadi sumber tekanan inflasi jika belanja terlalu ekspansif tanpa dukungan pasokan barang dan jasa.

Dalam konteks rumah tangga, bantuan sosial berfungsi sebagai bantalan ketika harga naik. Bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi energi, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan program perlindungan sosial lainnya dapat mencegah rumah tangga miskin jatuh ke kondisi lebih buruk. Namun efektivitas perlindungan sosial bergantung pada ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, nilai manfaat, akurasi data, dan integrasi program.

Subsidi energi adalah contoh kebijakan yang kompleks. Subsidi dapat menjaga harga energi tetap terjangkau dan menahan inflasi. Tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran dapat lebih banyak dinikmati kelompok mampu karena konsumsi energi mereka lebih besar. Subsidi besar juga mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur. Karena itu, reformasi subsidi harus dilakukan hati-hati, bertahap, komunikatif, dan disertai kompensasi bagi kelompok rentan.

Kebijakan fiskal juga dapat memperkuat sisi pasokan. Belanja untuk irigasi, jalan tani, gudang, pelabuhan, pasar induk, cold chain, digitalisasi distribusi, dan cadangan pangan dapat menurunkan biaya logistik dan mengurangi volatilitas harga. Dalam jangka panjang, pengendalian inflasi pangan membutuhkan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok, bukan hanya operasi pasar saat harga sudah naik.

APBN yang berpihak pada daya beli harus memiliki dua orientasi: perlindungan jangka pendek dan produktivitas jangka panjang. Perlindungan jangka pendek menjaga konsumsi rumah tangga miskin. Produktivitas jangka panjang menurunkan biaya produksi, memperbaiki pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada subsidi.

11. Inflasi, Nilai Tukar, dan Harga Impor

Nilai tukar rupiah memengaruhi inflasi melalui harga barang impor, bahan baku impor, energi, dan ekspektasi pasar. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat. Perusahaan yang menggunakan bahan baku impor

dapat menaikkan harga jual. Barang konsumsi impor menjadi lebih mahal. Jika pelemahan nilai tukar berlangsung lama, inflasi dapat meningkat.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa cost-push inflation dapat dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar, imported inflation, kenaikan administered prices, serta gangguan pasokan akibat bencana atau distribusi. ([Bank Indonesia](#)) Dengan demikian, stabilitas nilai tukar merupakan bagian dari stabilitas harga.

Bagi rumah tangga, dampak nilai tukar tidak selalu terlihat langsung. Mereka mungkin tidak membeli barang impor secara langsung, tetapi harga barang domestik dapat mengandung komponen impor. Pakan ternak, bahan bakar, obat-obatan, alat elektronik, bahan baku industri, dan logistik dapat terpengaruh nilai tukar. Akibatnya, pelemahan rupiah dapat merambat ke harga telur, ayam, obat, transportasi, dan barang konsumsi lainnya.

Namun, nilai tukar bukan satu-satunya faktor. Jika pasokan domestik kuat dan persaingan pasar sehat, pass-through nilai tukar ke harga konsumen dapat terbatas. Jika struktur pasar terkonsentrasi dan distribusi tidak efisien, pelemahan rupiah lebih mudah diteruskan ke konsumen. Karena itu, stabilisasi nilai tukar perlu dilengkapi dengan kebijakan industri, persaingan usaha, logistik, dan substitusi impor yang rasional.

12. Kesejahteraan Rumah Tangga: Lebih dari Sekadar Harga Murah

Kesejahteraan rumah tangga tidak hanya berarti harga murah. Harga yang terlalu rendah karena distorsi juga dapat merugikan produsen, terutama petani, nelayan, dan UMKM. Jika harga pangan ditekan terlalu rendah tanpa memperhatikan biaya produksi, petani kehilangan insentif meningkatkan produksi. Akibatnya, pasokan jangka panjang melemah dan inflasi dapat kembali meningkat.

Karena itu, tujuan kebijakan bukan sekadar menurunkan harga, tetapi menciptakan harga yang adil: terjangkau bagi konsumen, tetapi tetap layak bagi produsen. Dalam konteks pangan, keseimbangan ini sangat penting. Petani membutuhkan harga jual yang memberi keuntungan. Konsumen membutuhkan harga beli yang terjangkau. Pemerintah harus mengelola cadangan, distribusi, informasi pasar, dan intervensi yang tidak merusak insentif produksi.

Kesejahteraan juga mencakup kualitas konsumsi. Rumah tangga yang mampu membeli kalori murah belum tentu sejahtera jika tidak memperoleh protein, vitamin, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Inflasi pangan bergizi seperti telur, daging ayam, ikan, susu, sayur, dan buah dapat berdampak lebih serius daripada inflasi barang lain karena memengaruhi gizi anak dan kesehatan keluarga.

Di sisi lain, inflasi biaya pendidikan dan kesehatan dapat menghambat mobilitas sosial. Rumah tangga mungkin masih bisa makan, tetapi menunda pengobatan, mengurangi les anak, atau memilih layanan pendidikan lebih murah dengan kualitas lebih rendah. Dalam jangka panjang, inflasi biaya layanan dasar dapat memperlebar ketimpangan kesempatan.

Dengan demikian, kesejahteraan rumah tangga harus dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak, stabil, dan bermartabat. Stabilitas harga adalah syarat penting, tetapi harus dipadukan dengan layanan publik berkualitas, pendapatan memadai, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi.

13. Kelas Menengah dan Tekanan Biaya Hidup

Kelas menengah sering dianggap lebih aman dari inflasi dibanding rumah tangga miskin. Namun, dalam kenyataan, kelas menengah bawah juga rentan terhadap tekanan biaya hidup. Mereka memiliki pengeluaran tetap yang besar: cicilan rumah atau sewa, transportasi, pendidikan anak,

komunikasi digital, listrik, kesehatan, dan kewajiban sosial. Jika inflasi meningkat sementara pendapatan stagnan, ruang tabungan mereka menyempit.

Tekanan pada kelas menengah penting secara makroekonomi karena kelompok ini menjadi motor konsumsi domestik. Mereka membeli barang tahan lama, menggunakan jasa pendidikan dan kesehatan, bepergian, makan di luar, menggunakan transportasi, membeli rumah, dan mendukung pertumbuhan sektor jasa. Jika kelas menengah menahan konsumsi, dampaknya menyebar ke sektor perdagangan, restoran, transportasi, properti, dan UMKM.

Kelas menengah juga sensitif terhadap ekspektasi. Jika mereka khawatir harga akan terus naik, mereka dapat mengurangi belanja diskresioner dan meningkatkan tabungan berjaga-jaga. Jika mereka yakin pendapatan akan meningkat dan inflasi terkendali, konsumsi lebih stabil. Karena itu, pengendalian inflasi juga merupakan kebijakan menjaga kepercayaan kelas menengah.

Dalam masyarakat digital, tekanan biaya hidup semakin tampak melalui media sosial. Kenaikan harga pangan, transportasi, biaya sekolah, dan cicilan cepat menjadi percakapan publik. Persepsi inflasi kadang lebih kuat daripada inflasi resmi karena masyarakat mengingat harga barang yang sering dibeli, bukan keseluruhan keranjang IHK. Pemerintah perlu memahami dimensi psikologis ini. Komunikasi kebijakan harus jelas, empatik, berbasis data, dan tidak meremehkan pengalaman hidup masyarakat.

14. Inflasi dan UMKM

UMKM berada pada posisi ganda dalam inflasi. Sebagai konsumen input, UMKM tertekan oleh kenaikan harga bahan baku, energi, sewa, transportasi, dan upah. Sebagai produsen, UMKM dapat menaikkan harga

jual, tetapi tidak selalu mampu melakukannya karena pelanggan sensitif terhadap harga. Akibatnya, margin usaha mengecil.

Pedagang makanan kecil, misalnya, menghadapi kenaikan harga cabai, minyak, telur, daging ayam, gas, dan transportasi. Jika harga jual dinaikkan terlalu tinggi, pelanggan berkurang. Jika harga tidak dinaikkan, keuntungan turun. Sebagian UMKM menyesuaikan ukuran porsi, menurunkan kualitas bahan, atau mengurangi tenaga kerja keluarga. Penyesuaian ini dapat memengaruhi kesejahteraan pelaku usaha dan konsumen.

Inflasi juga memengaruhi akses modal UMKM. Ketika suku bunga naik untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar, biaya pinjaman dapat meningkat. UMKM yang membutuhkan modal kerja menghadapi beban lebih tinggi. Karena itu, kebijakan anti-inflasi perlu mempertimbangkan dukungan likuiditas dan pembiayaan produktif bagi UMKM.

Namun UMKM juga dapat menjadi bagian dari solusi. Digitalisasi rantai pasok, koperasi pangan, kemitraan petani-pedagang, platform distribusi, dan pembiayaan mikro dapat menurunkan biaya transaksi. Jika UMKM terhubung dengan produsen lokal dan pasar digital, ketergantungan pada rantai distribusi panjang dapat berkurang. Dengan demikian, kebijakan inflasi dan kebijakan UMKM harus saling terkait.

15. Dimensi Wilayah: Inflasi Daerah dan Ketimpangan Spasial

Indonesia adalah negara besar dengan ribuan pulau. Inflasi nasional adalah rata-rata dari berbagai realitas lokal. Harga di Jakarta, Bogor, Manado, Jayapura, Ternate, Kupang, Aceh Tengah, dan Minahasa Utara dapat bergerak berbeda. Faktor transportasi, produksi lokal, distribusi, cuaca, dan pasar daerah sangat menentukan.

Perbedaan inflasi wilayah dapat menciptakan ketimpangan kesejahteraan. Rumah tangga dengan pendapatan sama tetapi tinggal di wilayah harga tinggi akan memiliki daya beli lebih rendah. Aparatur, guru, tenaga

kesehatan, pekerja informal, dan keluarga miskin di wilayah dengan biaya logistik tinggi menghadapi tekanan lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan daya beli harus memperhatikan indeks kemahalan wilayah.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah memiliki peran penting. Pemerintah daerah dapat memantau harga pasar, memperkuat kerja sama antar-daerah, memperbaiki distribusi, mendukung operasi pasar, menyediakan informasi harga, menjaga kelancaran transportasi, dan mengantisipasi hari besar keagamaan. Inflasi pangan daerah sering kali dapat dikurangi melalui koordinasi yang tepat waktu.

Kebijakan pusat juga harus sensitif wilayah. Pembangunan infrastruktur logistik, pelabuhan, jalan daerah, gudang pangan, cold storage, dan konektivitas digital dapat menurunkan biaya distribusi. Dalam jangka panjang, stabilitas harga daerah adalah bagian dari pemerataan pembangunan.

16. Inflasi, Ekspektasi, dan Kepercayaan Publik

Inflasi bukan hanya persoalan harga hari ini, tetapi juga ekspektasi harga masa depan. Jika masyarakat percaya bahwa harga akan terkendali, mereka cenderung membuat keputusan konsumsi dan investasi dengan tenang. Jika masyarakat memperkirakan harga akan melonjak, mereka dapat membeli berlebihan, menuntut kenaikan upah, atau menaikkan harga lebih awal. Ekspektasi ini dapat memperkuat inflasi.

Kepercayaan publik terhadap data dan kebijakan sangat penting. Jika masyarakat tidak percaya pada angka inflasi resmi, komunikasi kebijakan melemah. Mereka mungkin merasa pengalaman belanja harian tidak sesuai dengan statistik. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan perbedaan antara inflasi umum, inflasi pangan, inflasi inti, dan inflasi yang dirasakan rumah tangga.

Transparansi harga juga membantu menurunkan ekspektasi negatif. Informasi stok beras, operasi pasar, pasokan cabai, kebijakan impor, distribusi minyak goreng, dan harga energi perlu disampaikan secara jelas. Ketidakpastian informasi dapat memicu spekulasi dan panic buying.

Dalam era digital, ekspektasi inflasi dapat terbentuk cepat melalui berita, media sosial, dan percakapan daring. Isu kenaikan harga dapat menyebar sebelum kebijakan resmi diterapkan. Karena itu, komunikasi publik harus proaktif, bukan reaktif. Data harus mudah dipahami, visual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

17. Strategi Kebijakan: Menjaga Inflasi dan Daya Beli

Strategi menjaga inflasi dan daya beli rumah tangga Indonesia perlu bersifat terpadu. Pertama, kebijakan moneter harus menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar. Suku bunga, operasi pasar, dan komunikasi kebijakan perlu diarahkan untuk menjaga inflasi dalam sasaran tanpa mematikan pertumbuhan.

Kedua, kebijakan pangan harus memperkuat produksi dan distribusi. Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki data stok, memperkuat cadangan pangan, mempercepat distribusi antarwilayah, dan menurunkan biaya logistik. Komoditas strategis seperti beras, jagung, telur, daging ayam, cabai, bawang, minyak goreng, gula, dan ikan memerlukan pemantauan khusus.

Ketiga, perlindungan sosial harus adaptif terhadap inflasi. Nilai bantuan sosial perlu dievaluasi terhadap perubahan harga kebutuhan dasar. Data penerima harus diperbarui agar bantuan menjangkau kelompok miskin dan rentan. Bantuan pangan dapat digunakan dalam kondisi inflasi pangan tinggi, tetapi harus dikelola agar tidak merusak pasar lokal.

Keempat, kebijakan energi harus menjaga keseimbangan antara keterjangkauan dan kesehatan fiskal. Subsidi energi perlu semakin tepat

sasaran. Reformasi harga energi harus disertai kompensasi bagi kelompok rentan dan komunikasi publik yang jelas.

Kelima, pemerintah perlu menjaga persaingan pasar. Struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi dapat memperbesar kenaikan harga. Pengawasan terhadap kartel, penimbunan, dan manipulasi distribusi penting untuk menjaga harga wajar.

Keenam, peningkatan pendapatan rumah tangga harus menjadi agenda utama. Inflasi rendah tidak cukup jika pendapatan stagnan. Produktivitas tenaga kerja, UMKM, pendidikan vokasi, industrialisasi, dan ekonomi digital perlu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan riil.

Ketujuh, penguatan data mikro sangat penting. Kebijakan inflasi harus mengetahui siapa yang paling terdampak, di mana, oleh komoditas apa, dan melalui saluran apa. Integrasi data harga, stok, distribusi, kemiskinan, bantuan sosial, dan konsumsi rumah tangga dapat meningkatkan ketepatan kebijakan.

18. Kerangka Analitis: Inflasi sebagai Masalah Makro-Mikro

Inflasi sering dianggap masalah makro karena berkaitan dengan jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, permintaan agregat, dan kebijakan moneter. Namun dampaknya terjadi pada tingkat mikro: rumah tangga, warung, petani, buruh, sopir, guru, mahasiswa, lansia, dan anak-anak. Oleh karena itu, analisis inflasi harus menghubungkan makro dan mikro.

Pada tingkat makro, inflasi memengaruhi pertumbuhan, investasi, nilai tukar, neraca pembayaran, suku bunga, dan stabilitas keuangan. Pada tingkat mikro, inflasi memengaruhi pilihan konsumsi, gizi, pendidikan, kesehatan, tabungan, utang, dan kualitas hidup. Kebijakan yang hanya melihat makro dapat mengabaikan penderitaan rumah tangga. Kebijakan yang hanya melihat mikro tanpa stabilitas makro dapat menghasilkan subsidi besar yang tidak berkelanjutan.

Kerangka yang lebih seimbang adalah melihat inflasi sebagai fenomena sistemik. Harga terbentuk dari interaksi produksi, distribusi, pasar, kebijakan, ekspektasi, nilai tukar, iklim, energi, dan perilaku konsumen. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan governance lintas sektor.

Dalam perspektif manajemen publik, pengendalian inflasi memerlukan koordinasi pusat-daerah, data real-time, kepemimpinan adaptif, komunikasi publik, evaluasi kebijakan, dan akuntabilitas. Inflasi tidak dapat ditangani dengan satu instrumen tunggal. Ia membutuhkan orkestrasi kebijakan.

19. Tantangan Masa Depan: Iklim, Geopolitik, dan Digitalisasi

Ke depan, inflasi Indonesia akan semakin dipengaruhi oleh tiga faktor besar: perubahan iklim, geopolitik, dan digitalisasi. Perubahan iklim meningkatkan risiko gagal panen, banjir, kekeringan, gangguan distribusi, dan volatilitas pangan. Harga pangan dapat menjadi lebih tidak stabil jika adaptasi pertanian tidak diperkuat.

Geopolitik memengaruhi harga energi, pangan global, pupuk, nilai tukar, dan rantai pasok. Konflik internasional dapat menaikkan harga minyak, gas, gandum, atau bahan baku industri. Negara importir harus memiliki strategi cadangan dan diversifikasi.

Digitalisasi dapat membantu pengendalian inflasi melalui data harga real-time, platform logistik, e-commerce pangan, pembayaran digital, dan analitik pasokan. Namun digitalisasi juga dapat menciptakan risiko baru, seperti konsentrasi platform, algoritma harga, dan ketimpangan akses digital.

Dalam menghadapi masa depan tersebut, Indonesia memerlukan sistem ketahanan harga. Sistem ini mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas moneter, perlindungan sosial adaptif, data terpadu, dan tata kelola pasar. Tujuannya bukan menghapus semua fluktuasi harga,

karena sebagian fluktuasi adalah bagian dari ekonomi pasar, tetapi mencegah gejolak harga berubah menjadi krisis kesejahteraan.

20. Kesimpulan

Inflasi adalah persoalan ekonomi sekaligus persoalan kesejahteraan. Bagi rumah tangga Indonesia, inflasi menentukan apakah pendapatan cukup untuk membeli makanan, membayar transportasi, menyekolahkan anak, berobat, menabung, dan hidup bermartabat. Inflasi yang rendah dan stabil menjaga nilai riil pendapatan, memperkuat kepastian ekonomi, dan mendukung pertumbuhan. Namun inflasi tidak netral. Dampaknya lebih berat bagi rumah tangga miskin, rentan, pekerja informal, daerah berbiaya tinggi, dan keluarga dengan porsi pengeluaran pangan besar.

Kondisi Indonesia pada 2026 menunjukkan bahwa inflasi masih dalam koridor sasaran, tetapi risiko tetap perlu diwaspadai. Inflasi IHK Mei 2026 sebesar 3,08 persen masih berada dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen, tetapi tekanan pangan, nilai tukar, harga energi, dan ekspektasi harga tetap dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan September 2025 masih mencakup 23,36 juta penduduk. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, pengendalian inflasi harus dipahami sebagai kebijakan sosial-ekonomi yang menyeluruh. Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas harga dan ekspektasi. Pemerintah berperan menjaga pasokan pangan, subsidi tepat sasaran, perlindungan sosial, logistik, energi, dan tata kelola pasar. Pemerintah daerah berperan mengelola inflasi lokal. Dunia usaha berperan menjaga efisiensi dan etika harga. Masyarakat berperan dalam perilaku konsumsi rasional dan partisipasi pengawasan pasar.

Kesejahteraan rumah tangga Indonesia hanya dapat diperkuat apabila stabilitas harga dipadukan dengan peningkatan pendapatan riil. Inflasi rendah tanpa peningkatan pendapatan tidak cukup. Pendapatan naik tanpa

stabilitas harga juga rapuh. Jalan terbaik adalah kombinasi antara stabilitas harga, produktivitas, perlindungan sosial, dan pemerataan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan menjaga kehidupan nyata jutaan keluarga Indonesia.

Glossarium

Administered Prices

Komponen inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan harga pemerintah, seperti BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif transportasi tertentu.

Cost-Push Inflation

Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi, misalnya akibat kenaikan harga energi, bahan baku, upah, atau depresiasi nilai tukar.

Daya Beli

Kemampuan pendapatan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Daya beli menurun ketika harga naik lebih cepat daripada pendapatan.

Demand-Pull Inflation

Inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi ekonomi.

Ekspektasi Inflasi

Perkiraan masyarakat dan pelaku usaha mengenai kenaikan harga di masa depan, yang dapat memengaruhi keputusan konsumsi, produksi, upah, dan harga.

Garis Kemiskinan

Nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan

nonmakanan dasar. Penduduk dengan pengeluaran di bawah garis ini dikategorikan miskin.

IHK atau Indeks Harga Konsumen

Indeks yang mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.

Inflasi

Kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu.

Inflasi Inti

Komponen inflasi yang lebih persisten dan dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi, seperti permintaan, penawaran, nilai tukar, dan ekspektasi.

Inflasi Pangan

Kenaikan harga komoditas makanan, terutama bahan pangan pokok dan bahan makanan strategis.

Imported Inflation

Inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor atau pelemahan nilai tukar yang membuat barang impor lebih mahal.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah melalui pendapatan, belanja, subsidi, bantuan sosial, dan pembiayaan negara.

Kebijakan Moneter

Kebijakan bank sentral untuk mengelola suku bunga, likuiditas, nilai tukar, dan stabilitas harga.

Kesejahteraan Rumah Tangga

Kondisi ketika keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendapatan memadai, akses layanan publik, keamanan ekonomi, dan kualitas hidup yang layak.

Pendapatan Riil

Pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi. Pendapatan riil menunjukkan daya beli sebenarnya.

Perlindungan Sosial

Program pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko ekonomi dan sosial, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan subsidi.

Subsidi Tepat Sasaran

Subsidi yang diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada seluruh konsumen secara merata.

Volatile Food

Komponen inflasi pangan yang mudah bergejolak karena faktor panen, cuaca, distribusi, dan harga pangan domestik maupun internasional.

Daftar Pustaka

Referensi Akademik

Albanesi, S. (2007). Inflation and inequality. *Journal of Monetary Economics*, 54(4), 1088–1114. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2006.02.009

Bils, M., & Klenow, P. J. (2004). Some evidence on the importance of sticky prices. *Journal of Political Economy*, 112(5), 947–985. DOI: 10.1086/422559

Blanchard, O., & Galí, J. (2007). Real wage rigidities and the New Keynesian model. *Journal of Money, Credit and Banking*, 39(s1), 35–65. DOI: 10.1111/j.1538-4616.2007.00015.x

- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., Kueng, L., & Silvia, J. (2017). Innocent bystanders? Monetary policy and inequality. *Journal of Monetary Economics*, 88, 70–89. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2017.05.005
- Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. *American Economic Review*, 70(3), 312–326. DOI: 10.2307/1805222
- Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(2), 160–178. DOI: 10.2307/2673879
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512. DOI: 10.1016/0304-3932(93)90027-D
- Friedman, M. (1977). Nobel lecture: Inflation and unemployment. *Journal of Political Economy*, 85(3), 451–472. DOI: 10.1086/260579
- Ivanic, M., & Martin, W. (2008). Implications of higher global food prices for poverty in low-income countries. *Agricultural Economics*, 39(s1), 405–416. DOI: 10.1111/j.1574-0862.2008.00347.x
- Ravallion, M. (1990). Rural welfare effects of food price changes under induced wage responses: Theory and evidence for Bangladesh. *Oxford Economic Papers*, 42(3), 574–585. DOI: 10.1093/oxfordjournals.oep.a041966
- Romer, C. D., & Romer, D. H. (1999). Monetary policy and the well-being of the poor. *Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Q I*, 21–49.
- Walsh, C. E. (2017). *Monetary theory and policy* (4th ed.). MIT Press.

Dokumen Statistik dan Kebijakan

- Badan Pusat Statistik. (2026). *Inflasi year-on-year pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y)*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia resilien dan tumbuh solid pada triwulan I-2026*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. BPS.

Bank Indonesia. (2026). *Inflation: Introduction, measurement, disaggregation, determinants, and target*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate indicator*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026). *Consumer survey May 2026: Solid consumer confidence maintained*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026). *Retail sales survey May 2026: Retail sales expected to remain stable*. Bank Indonesia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 12 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a2b94f7-be20-83ec-9571-86009e1ff5d4)). <https://chatgpt.com/c/6a2b94f7-be20-83ec-9571-86009e1ff5d4>